

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRIGADE SIAGA BENCANA DALAM TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN BANTAENG

M. Munawwir¹, Alyas, M.S², H. Lukman Hakim³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: awilmn83@gmail.com

Abstrak

Bencana dalam Tanggap Darurat di Kabupaten Bantaeng dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, standar dan sumber daya tujuan kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana (Disposition), kejelasan informasi komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana (inter- komunikasi organisasi dan kegiatan penegakan) dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik (kondisi ekonomi, sosial dan politik). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Standar dan tujuan kebijakan (standard and objectivity), dasar hukum pelaksanaannya adalah UUD 1945 pasal 28 ayat 1, yang kemudian secara teknis diterjemahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 462 Tahun 2002 tentang Masyarakat Aman. Kebijakan pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. (2) Sumber daya, dalam hal jumlah dan keahlian sumber daya manusia yang ditugaskan di tim BSB sudah mencukupi. (3) Karakteristik instansi pelaksana, dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap program ini cukup memadai baik dari segi anggaran maupun kebutuhan. (4) Sikap dan kecenderungan pelaksana (Disposition), pemahaman pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan kebijakan ini dipahami dengan baik (5) Kejelasan komunikasi informasi antara organisasi dan pelaksana kegiatan (komunikasi antar organisasi dan kegiatan penegakan) bahwa dalam rangka memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat, petugas BSB melibatkan kelompok masyarakat sebagai media pendukung informasi (6) Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Dukungan kuat bagi keberhasilan program Brigade Siaga Bencana terletak pada modal sosial yang dimiliki Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah sebagai inisiator.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Brigade Siaga Bencana

Abstract

Disaster in Emergency Response in Bantaeng Regency with several factors affecting the implementation of policies, standards and policy objectives resources, characteristics of the implementing agencies, attitude and tendency of implementers (Disposition) , clarity of information on communication between organizations and implementing activities (inter-organizational communication and enforcement activities) and conditions of the economic, social and political environment (economic, social and political conditions). The method used in this research was descriptive qualitative using observation, interview, and documentation instruments. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that; (1) Standard and policy objectives (standards and objectivity), the legal basis for its implementation is by the 1945 Constitution article 28 verse 1, which was then technically translated through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 462 of 2002 concerning Safe Community. This government policy is expected to be able to enhance public health status. (2) Resources, in terms of the number and expertise of the human resources assigned to the BSB team, are sufficient. (3) The characteristics of the implementing agencies, District government support for this program is quite adequate both in terms of budget and needs. (4) The attitude and tendency of the implementers (Disposition), the understanding of policy implementers about the standards and objectives of this policy is well understood (5) Clarity of information communication between organizations and activities implementer (inter-organizational communication and enforcement activities) that in order to provide clarity of the information to the public, BSB officers involve community groups as information support media (6) Economic, social and political conditions. Strong support for the success of the Disaster Preparedness Brigade program lies in the social capital owned by The Regent of Bantaeng, Nurdin Abdullah as the initiator.

Keywords: Implementation, Policy, Disaster Alert Brigade

1. PENDAHULUAN

Pada sektor kebijakan, Brigade Siaga Bencana telah di desain sebagai komponen

yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana dilapangan, yang diharapkan dapat memberikan unsur pelayanan kesehatan pra rumah sakit maupun

unsur pelayanan rumah sakit secara cepat yang bertujuan mengurangi angka kematian dan angka kecacatan korban bencana hal ini dapat kita lihat setiap tahunnya Angka Kematian Ibu sampai 200 kasus dan angka kematian bayi sebanyak 165 kasus, namun sejak adanya kebijakan Brigade Siaga Bencana kasus-kasus tersebut terus menurun secara drastis, khusus untuk penanganan kasus lain seperti banjir dan kebakaran kesigapan tim *emergency service* tersebut selalu menjadi yang terdepan dalam penanganan.

Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam penanganan bencana banyak faktor yang menyebabkan korban meninggal atau cacat disebabkan karena penanganan yang tidak maksimal, faktor tersebut meliputi kesiagaan masyarakat, atau kesadaran masyarakat untuk mengambil peran dalam penanganan, seperti pemberian informasi dan kordinasi kepada pusat pelayanan juga, lemahnya sistem kerja sama antar tim multidisiplin dalam penanganan tanggap darurat, seperti masih terkotak-kotaknya pada tanggung jawab masing-masing, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Pada dasarnya kehadiran Brigade Siaga Bencana di kabupaten Bantaeng dapat mengalami kegagalan kebijakan (*policy failure*) apabila dilihat dalam dua kategori, yaitu kebijakan yang tidak terimplementasikan (*non-implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, hal ini bisa disebabkan karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi mana kala suatu kebijakan dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya karena pergantian kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Beberapa kasus yang terjadi seringkali kebijakan mengalami kegagalan disebabkan karena faktor politik, yaitu menyangkut siapa yang mendapatkan apa dari kebijakan tersebut atau antara pihak pelaksana tidak dapat bekerjasama secara efektif, hingga faktor pergantian kekuasaan yang memodifikasi kebijakan sehingga tidak lagi sesuai dengan

perencanaan pada awalnya. Dari hasil pengamatan penulis lakukan terkait masalah implementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana di kabupaten bantaeng bahwa masih perlunya peningkatan kesigapan staf, keterampilan dalam menangani pasien karena sekarang pasien yang ditangani terus bertambah, kelengkapan sarana terutama armada perlu penambahan setiap kecamatan di kabupaten bantaeng dan masalah yang dihadapi mekanisme anggaran karena dinaungi dua SKPD yaitu Dinas sosial dan Dinas kesehatan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bantaeng diperlukan inovasi dan kreatifitas dari pemerintah saat ini karena program Brigade Siaga Bencana terutama armada yang tersedia adalah hibah dari jepan, setelah adanya transisi kepemimpinan Brigade Siaga Bencana kesulitan mendapatkan bantuan mobil *ambulane* dan pemadam kebakaran.

Brigade Siaga Bencana merupakan konsep menangani situasi krisis dengan basis *emergency* dan komunitas. Sifat *emergency* berarti konsep layanan tersebut mengutamakan cepat siaga. Sedangkan komunitas untuk memberi arti bahwa layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat. Keistimewaan dari Brigade Siaga Bencana adalah mekanisme untuk mendekatkan pelayanan dasar kesehatan kepada seluruh masyarakat Bantaeng. Berdasarkan sudut pandang dan uraian di atas, maka peneliti melakukan kajian mendalam tentang “implementasi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat dikabupaten Bantaeng”

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tahjan (2008), menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkakan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Nugroho (2009), memberi makna implementasi kebijakan sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang". Ditambahkan pula, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Selain itu implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009). Implementasi kebijakan, grindle dalam Abidin (2002), menjelaskan model yang ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Grindle, yang diilhami hasil penelitian para ilmuwan sosial politik pada beberapa kasus kebijakan banyak terjadi di negara dunia ketiga seperti asia, Afrika maupun Amerika latin, tampak lebih tertarik dan focus terhadap konflik dalam pembuatan kebijakan yang kerap terjadi. Karenanya pertanyaan yang muncul terkait dengan implementasi kebijakan berkisar pada konflik pembuatan keputusan; "siapa mendapat apa (*who get what*)".

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi, seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil –hasil program terhadap tujuan –tujuan kebijakan. Menurut Winarno (2002), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tahap siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama-sama dan simultan untuk melaksanakan kebijakan agar dampak dan tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik. Menurut Dwijowjoto (2003), bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program maupun melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, sedangkan formulasi kebijakan bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri (Dunn, 2003). Dengan kata lain implementasi kebijakan merupakan tataran praktis dari sebuah kebijakan. Terdapat beberapa bagian yang dapat diajukan untuk dinilai dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik, yaitu output kebijakan, dampak nyata dari kebijakan, dan peraturan perundangan yang biasanya bersifat politis.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Agar kebijakan implementatif, maka dikenal beberapa pendekatan. Secara teoritik empirik, pendekatan pendekatan ini dianggap memadai sebagai alat bantu atau penguatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Walau dari berbagai pendekatan praktiknya membutuhkan pertimbangan kompherensif sehingga pendekatan yang dipilih, diadaptasi atau mungkin bahkan dikombinasi adalah teknis sesuai kebutuhan. Untuk kepentingan implementasi kebijakan, bukan merupakan monopoli secara linier dari hanya para ahli kebijakan saja. Tetapi bisa diadopsi dari para ahli ilmu -ilmu sosial lain, baik dari pakar ilmu politik, pakar organisasi dan manajemen maupun dari para ahli lainnya. Dengan kata lain untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan pendekatan dan ilmu yang komprehensif sejalan dengan yang dikemukakan (Nicolas Henry dalam Winarno, 2012).

Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah.

Menurut Dunn (2000), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: "*Policyimplementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy*

decisions. “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Banyak model dalam proses implementasi kebijakan yang dapat digunakan. Dunn (2000), mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997) dalam Nugroho, (2004) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a) Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b) Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekertariat Brigade Siaga Bencana Kabupaten Bantaeng. Adapun teknik yang dilakukan dalam mengimput data adalah sebagai berikut; wawancara, observasi dan studi dokumentasi dan langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis yaitu; reduksi data, menyajikan data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Kemudian uji keabsahan datanya melalui; perpanjangan masa pengamatan, teknik meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Sasaran dan Tujuan Kebijakan (*standar and objectivity*),

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan program tim *emergency service* brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng. Ketidakmenentuan standar dan tujuan kebijakan dapat membuat kesulitan bagi implementor untuk memahaminya dan sekaligus dapat memunculkan keragaman pada disposisi (kecenderungan implementor untuk melaksanakan kebijakan) berbagai aktor yang terlibat dalam proses implementasi, kondisi ini akhirnya akan kurang mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan tim *emergency service* brigade siaga bencana kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian ini peneliti membagi penilaian standar (ukuran-ukuran dasar) dan tujuan program tim *emergency service* brigade bencana.

Sumber Daya (*Resource*)

Sumberdaya anggaran yang dibutuhkan oleh brigade siaga bencana dialokasikan melalui Dinas Kesehatan yang juga merupakan penanggung jawab program, sehingga kebutuhan-kebutuhan organisasi BSB berasal dari anggaran dinas kesehatan. Menurut Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya akan mempengaruhi kecenderungan pelaksana, mempengaruhi komunikasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi serta politik organisasi pelaksana (seperti motivasi, tuntutan peran serta.dll) (Winarno, 2002: 120). Hasil penelitian pada dimensi sumber daya, dapat dikatakan sudah memenuhi, dengan kriteria kesiapan petugas BSB dari segi jumlah maupun keahlian sudah memenuhi kebutuhan, demikian halnya dari segi sumber daya anggaran, insentif petugas dan jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan setiap tahun.

Karakteristik Badan Pelaksana (*the characteristic of the implementing agencies*),

Kaitan formal antara pembuat kebijakan (*policy maker*), dengan para pelaksana kebijakan (*implementor*), memiliki kaitan yang sangat erat, posisi bupati Bantaeng sebagai kepala daerah yang juga merupakan penanggung jawab pembangunan adalah inisiator dari lahirnya program BSB ini, kaitan ini memberikan dampak (*impact*), positif terhadap keberhasilan program, pada fakta lain ditemukan informasi bahwa beberapa fasilitas penunjang operasional kegiatan BSB, yaitu ambulance modern yang berasal dari bantuan CSR pemerintah Jepang dan juga Bank Sulsel, atas dasar kerjasama dari Bupati Bantaeng selaku pembuat kebijakan (*policy maker*). Sehingga pada dimensi hubungan dan keterkaitan antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan dapat dikatakan sudah cukup baik dan menunjang terimplementasinya program ini.

Sikap Pelaksana Kebijakan (*Disposition*)

Bahwa pemahaman para pelaksana kebijakan tentang standard dan tujuan dari kebijakan ini sangat dipahami, hal ini didasarkan pada adanya komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Bantaeng tentang pentingnya program ini

dilaksanakan. faktor pendukung lahirnya komitmen individu untuk bertugas sudah sangat memadai, dilihat dari sisi harapan dan psikologis personil BSB, sudah cukup menunjang baik dari sisi beban kerja maupun insentif yang didapatkan.

Kejelasan Informasi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (*introrganization communication and enforcement activities*).

Untuk menghindari terjadinya *overlapping* dalam kewenangan maka brigade siaga bencana menugaskan tugas-tugas pokok personil kedalam uraian tugas yang dipajang pada sekretariat BSB. Dalam kajian teori implementasi dilihat pada dimensi kejelasan informasi memang semestinya pemberi informasi adalah orang yang secara khusus diberikan tugas untuk memberikan informasi secara akurat, sehingga yang dibutuhkan sebetulnya adalah adanya ketersediaan hirarki penanggung jawab informasi mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan, yang bertugas untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diterima melalui *call center* BSB.

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social and political conditions*).

Pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati Bantaeng memiliki modal sosial dan reputasi yang cukup baik dimata masyarakat dan kelompok sosial sehingga dukungan senantiasa diberikan apabila ada program-program yang masih baru, terutama program untuk yang berbasis kebutuhan masyarakat. Keterlibatan kelompok masyarakat dalam mendukung program BSB, terlihat pada sektor ketenagaan BSB, dimana tokoh masyarakat tokoh agama dan kelompok forum jaringan serta ormas seperti Fatayat NU, berpartisipasi secara langsung untuk mendukung program ini. Program BSB ini mendapat dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat disebabkan karena adanya kepercayaan kepada pemerintah bahwa program tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Standar dan tujuan kebijakan (*standar and objectivity*), Tujuan dilahirkannya program Brigade siaga bencana, apabila dilihat dari sisi dasar hukum pelaksanaannya sesuai dengan Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 dimana dinyatakan bahwa : “Salah Satu Hak Dasar Rakyat adalah Hak Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan” dengan mengambil kebijakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak warga Negara Indonesia, yang selanjutnya secara teknis diterjemahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community*. Kebijakan pemerintah inilah yang diharapkan mampu memperbaiki derajat kesehatan masyarakat
- b. Sumberdaya (*resource*), Bahwa dari segi jumlah maupun keahlian SDM yang bertugas pada tim BSB, dianggap telah cukup memadai, dari segi jumlah personil dengan prosedur kerja tim BSB dinilai sudah seimbang, mengingat posisi BSB adalah arus lalu lintas penanganan pra rumah sakit sehingga tidak begitu banyak membutuhkan personil jika dibandingkan dengan unit pelayanan kesehatan lainnya. Dari segi keahlian personil yang bertugas pada BSB , tim dokter, perawat, sopir, dll, dari informasi diatas dianggap tidak masalah, ukuran dari kemampuan personil
- c. Karakteristik agen pelaksana (*the characteristic of the implementing agencies*), dukungan pemerintah kabupaten terhadap program ini cukup memadai baik dari sisi anggaran maupun kebutuhan yang diperlukan oleh BSB dalam menjalankan tugas, kehadiran tim emergency service dirasakan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan tim BSB menekan jumlah korban jiwa karena keterlambatan penanganan, melahirkan kepercayaan bagi eksekutif maupun legislative untuk terus memaksimal fungsi program ini

- d. Sikap dan kecenderungan para pelaksana (*Disposition*), pemahaman para pelaksana kebijakan tentang standard dan tujuan dari kebijakan ini sangat dipahami, hal ini didasarkan pada adanya komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan dalam hal ini Bupati Bantaeng tentang pentingnya program ini dilaksanakan. Dari sisi komitmen individu untuk menjalankan tugas juga tidak ada kendala yang berarti pembagian tugas yang jelas dan tambahan *reward* yang jelas sangat sejalan dengan ekspektasi dan psikologi para petugas BSB
- e. Kejelasan Informasi komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana (*introrganization communication and enforcement activities*) bahwa untuk memberikan kejelasan informasi kepada masyarakat maka petugas BSB, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sebagai media pembantu informasi agar masyarakat memahami keberadaan BSB sebagai garda terdepan dalam penanganan gawat darurat, namun saluran informasi belum sepenuhnya utuh diterima oleh masyarakat.
- f. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik (*economic, social and political conditions*). dukungan kuat terhadap keberhasilan program Brigade siaga bencana terletak pada modal sosial yang dimiliki oleh bupati Bantaeng Nurdin Abdullah selaku inisiator dari brigade siaga bencana, kepercayaan masyarakat dan kelompok sosial politik kepada keberhasilan-keberhasilan program terdahulu memberikan kontribusi positif terhadap kebijakan program brigade siaga bencana.

6. REFERENSI

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Brigade Siaga Bencana, *Data Hasil Capaian Brigade Siaga bencana, 2010-2015*, Bantaeng 2017.
- Dunn, William H., 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Holilah. 2013. *Etika Administrasi Publik*. Jurnal Review Politik Volume 03, Nomor 02.
- Islamy, M Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. 2012. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Mustopadiadjaja, AR.2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LAN.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant.2009. *Public Policy (edisi revisi)*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rau, Muh. Jusman. 2016. *Hubungan Motivasi Dan Disiplin Kerja Dengan Kinerja Pegawai Di Puskesmas Sangurara Kecamatan Palu Barat Kota Palu*. jurnal.untad.ac.id. diakses 25 Oktober 2016.
- Riant (2003) *Kebijakan Publik ; Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rasyid, Ryaas. 2004. *Dsentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Alfabeta, Bandung.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : RTH
- Utomo, Budi. 2002. *Menentukan Faktor-Faktor Kepuasan kerja dan Tingkat pengaruh Kepuasan kerja Terhadap Loyalitas Karyawan*. PTP. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 7(2), 178-188.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen:

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah OPD yang penerapan di Pemerintah Kabupaten berlaku sejak bulan Januari Tahun 2017, kemudian di jabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 59 Tahun 2016 Tentang kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas kesehatan.
- Anugerah Otonomi Award 2011 oleh *The Fajar Institute of Pro-Otonomi (Antaraneews.com)*
- Badan Pusat Statistik Kab. Bantaeng dalam angka 2016. Bantaeng 2017
- SK Bupati Bantaeng No.430/595/XII/2009 Tentang Pembentukan Tim Emergency Service.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C ayat 1